Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 1 (2024): Februari, 150-156
DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4613

Inisiasi Pasca Tambang Menuju Desa Wisata Perlang (Studi di Desa Perlang, Lubuk Besar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Michael Jeffri Sinabutar*, Tiara Ramadhani, Miftahul Ulum
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
Jurusan Perikanan Tanggkap, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung
*Correspondence: michael-jeffri@ubb.ac.id

Abstrak. Inisiatif lokal dalam memperbaiki kondisi desa, mulai dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi sebagai wujud kepedulian dan kedaulatan masyarakat atas segenap potensi sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Tantangan serius yang dihadapi masyarakat lokal adalah menjamin keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Pembangunan bisa saja menjadi suatu ancaman bagi masyarakat lokal, tapi di sisi lain menjadi peluang membangun desa mandiri. Pembiaran terhadap wilayah bekas tambang atau galian timah bukanlah kemudian menjadi pertanda bahwa tidak ada jaminan akan kesejahteraan, seyogyanya menjadi tantangan serius dalam membangun desa. Salah satu daerah yang mampu melakukan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan ekonomi lokal adalah Desa Wisata Perlang. Daerah ini kemudian menjadi salah satu ikon dan destinasi wisata di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui akar inisiatif lokal membangun daerah pasca tambang, model inisiatif lokal, lalu bagaimana pertemuan antara beragam kepentingan di aras lokal, sehingga mampu menciptakan Desa Wisata. Pendekatan yang dipakai adalah dengan memakai bingkai Demokrasi Deliberatif pada masyarakat Desa Perlang, dengan melibatkan beberapa aktor penting desa yaitu Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Pokdarwis, dan aktor berkepentingan.

Kata kunci : desa wisata, inisiatif lokal, pokdarwis

Abstract. *Local initiatives in improving village conditions, starting from social, cultural and economic aspects as a form of community concern and sovereignty over all potential human resources and natural resources. A serious challenge faced by local communities is to ensure balance and sustainability of the local economy. Development could be a threat to local communities, but on the other hand it is an opportunity to build an independent village. Ignoring former mining or tin mining areas is not a sign that there is no guarantee of prosperity, it should be a serious challenge in developing villages. One area that is capable of innovation and creativity in local economic development is the Perlang Tourism Village. This area later became one of the icons and tourist destinations in the Bangka Belitung Islands. This research aims to find out the roots of local initiatives to develop post-mining areas, local initiative models, and how various interests in the local area meet, so as to create a Tourism Village. The approach taken is to use a Deliberative Democracy frame in the Perlang Village community, involving several important village actors, namely the Village Government, Community Leaders, Pokdarwis, and interested actors.*

Keywords **:** *tourism village, local initiatives, pokdarwis*

PENDAHULUAN

Semangat Undang-undang Desa mewadahi partisipasi warga melalui berbagai arena musyawarah desa, merupakan arena kontestasi dan negoisasasi kepentingan para pemangku kepentingan desa sampai mengarah kepada konsensus (kesepakatan bersama). Gerbang pembangunan demokrasi berfokus pada situasi masyarakat lebih terbuka, saling mempengaruhi, masyarakat dengan relasi egaliter, sehingga komunikasi terbebas dari dominasi dan hegemoni (Habermas, 2010). Ada 2 (dua) persoalan dihadapi masyarakat desa, pertama mengenai kepentingan publik terhadap informasi, isu, masalah, dan kebutuhan dasar masyarakat acapkali tereduksi oleh kepentingan para elite desa atau supra desa. kedua, penyempitan akses masyarakat untuk terlibat dan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan strategis menyangkut desa dan masa depan desanya.

Pendekatan demokrasi partisipatoris setidaknya mampu menjadi daya ungkit mendasar bagaimana inisiatif warga berhasil masuk ke arena strategis formal desa (Sujito, 2016). Arena semacam Musdes, Musrembangdes, maupun forum-forum informal sektoral komunitas telah menjadi habitat subur

bagi tumbuh dan terbangunnya interaksi kekuasaan yang semakin cair. praktik kekuasaan di desa menampilkan keunikan khas, sebagai situs baru demokrasi lokal, jika dirumuskan menjadi pola deliberatif democracy (demokrasi deliberatif). Keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa menjadi peluang sekaligus menyediakan tantangan dalam mendorong tumbuh kembangnya demokrasi *substantive* (substantif), ditandai dengan adanya demokrasi deliberative, mewujud dalam bentuk ruang publik. Keberadaan ruang publik dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses formulasi kebijakan, akan mencapai demokrasi bermakna bagi masyarakat desa. Ringkasnya, keberadaan ruang publik menentukan bagaimana demokrasi deliberative mampu berjalan (Piliang, 2005).

Provinsi Kepulauan Bangka belitung merupakan wilayah tambang timah terbesar di Indonesia. Selain itu Bangka Belitung juga merupakan penghasil timah terbanyak ke 2 di dunia setelah China. Pertambangan timah di Bangka Belitung sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu, yaitu sejak tahun 1711. Pertambangan timah terdiri dari model konvensional dan inkovensional. Tambang inkonvensional atau sering disebut dengan Timah Ilegal merupakan salah satu bentuk ekspolitasi timah paling banyak dilakukan oleh para penambang. Secara umum masyarakat Bangka Belitung berprofesi sebagai penambang timah dengan prosentase 24,37% (Disnaker Provinsi Bangka Belitung, 2023). Potensi timah menyumbang 40% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bangka Belitung (Mongabay, 2022) .

Penambangan Timah di Pulau Bangka sudah berlangsung sejak tahun 1700 pada era Pemerintahan Kesultanan Palembang, lalu berpindah ke pendudukan VOC-Belanda, Inggris, pemerintahan Hindia-Belanda, kolonial Jepang dan berlanjut di era pemerintahan Negara Indonesia (Sujitno, 2007; Erman dkk, 2009). Sejak saat itu, terdapat beberapa wilayah di Pulau Bangka (juga Pulau Belitung) yang menjadi tempat-tempat aktivitas pertambangan timah, salah satunya Desa Perlang. Artinya penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sudah dilakukan sejak ratusan abad silam. Salah satu PT yang memegang pertambangan di Bangka Belitung itu ada PT Koba Tin yang mulai beroperasi pada tahun 1973, dan diketahui sudah pailit pada pertengahan tahun 2020.

Danau Pading di Desa Perlang merupakan salah satu destinasi wisata dari sekian banyak tempat wisata di Bangka Tengah. Danau Pading atau yang dikenal juga dengan Kulong Atap Seng ini berada di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh sekitar 30-40 menit dari Kota Koba Bangka Tengah dan jika ditempuh dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan jarak kurang lebih 80 kilometer dengan lama perjalanan sekitar satu setengah jam. Danau ini sejatinya merupakan lahan bekas penambangan pasir timah yang membentuk kawah seperti danau seluas dengan hamparan pasir yang ada di sekelilingnya.

Danau Pading merupakan danau yang terbentuk dari hasil tangan manusia setelah proses penambangan timah. Bekas penambangan timah ini kemudian dikelola sedemikian rupa oleh para pemuda Desa Perlang pada bulan Oktober tahun 2020. Inisiatif pemuda desa dengan mengubah bekas galian tambang timah yang terbengkalai menjadi danau indah sebagai salah satu daya tarik wisata. Desa Perlang. Desa Perlang memiliki wilayah paling luas di antara desa lainnya di wilayah Bangka Tengah, yaitu sekitar 144,31 km^2 dengan persentase 24% dari luas total Kecamatan Lubuk Besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Desa Perlang sekitar 6.198 orang. Desa Perlang memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, mulai dari industri, pertanian, pertambangan, perikanan tangkap, budidaya perikanan, hingga pariwisata (BPS Kecamatan Lubuk Besar, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus memiliki beberapa keunggulan, *pertama* terletak pada studi mikro (Sitorus, 1998). Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kep. Bangka Belitung. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan atas 2 (dua) hal yaitu : pertama, inisiatif warga secara khusus pemuda di Desa Perlang dalam membangun potensi lokal; Kedua, Penghargaan kepada Desa Wisata Perlang sebagai Juara 3 dalam Kategori Digital Kratif ADWI 2022.

Studi kasus dipilih untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui faktor-faktor, inisiatif lokal, dan model komunikasi dalam pembentukan Desa Wisata Perlang pasca tambang. Kedua, menekankan pada pelacakan waktu sendiri (Yin, 2013). Dalam artian

menekankan pada latar historis pembentukan Desa Wisata Perlang. Ketiga, bersifat multi-metode (Sitorus, 1998), karena dalam studi kasus dapat melakukan metode pengamatan, seperti wawancara, focus group discussion, dan analisis dokumen yang digunakan untuk mendukung studi kasus.

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang model inisiatif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Perlang. Masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata tidak dipandang hanya sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek pembangunan yang turut andil dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagai perencana, pelaksana, pengelola dan pemantau melahirkan ide sebagai insiatif lokal yang dipengaruhi oleh struktur budaya masyarakat lokal akan menjadi inisiatif lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Perlang.

Studi tentang deliberasi dan partisipasi masyarakat lokal merupakan kajian menarik dan relevan dalam semangat pembangunan berbasis pada inisiasi dan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Penelitian Elissa (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat rendah pada saat musyawarah pembangunan. Keterlibatan masyarakat dusun Patihan sebagai perencana, pelaksana, pengelola dan pemantau serta evaluator sesuai dengan prinsip pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT). Pengembangan pariwisata Pantai Goa Cemara merupakan inisiatif lokal masyarakat dusun Patihan. Bentuk inisiatif lokal dalam pengembangan pariwisata meliputi pengelolaan obyek wisata, pembangunan pasar telo dan penyelenggaraan kirab budaya. Aktor pengembangan pariwisata dibedakan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan dan eavluasi. Aktor tersebut merupakan masyarakat lokal sehingga sesuai dengan prinsip pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Penelitian Musthofa (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan inisiatif lokal merupakan kunci yang harus dilakukan untuk keberhasilan pengembangan wisata perdesaan di Indonesia. Inisiatif lokal perlu dimunculkan dan dipromosikan bersamaan dengan penguatan local champion yang mampu menjadi agen perubahan masyarakat. Lebih dalam lagi, pada pengembangan wisata perdesaan, proses membangun partisipasi masyarakat dan inisiatif lokal harus didukung pula dengan penguatan jejaring antar stakeholder yang terlibat di dalamnya sehingga mempercepat keberhasilan suatu destinasi wisata perdesaan.

HASIL

Ide awal pengembangan wilayah ini dimulai pada tahun 2020, tepat pada masa awal Pandemi Covid-19. Kondisi pada saat itu membuat ketidakpastian dalam pembangunan di Desa yang dialami oleh masyarakat Desa Perlang, terkhusus para pemuda-dan pemudi desa. Pokdarwis di Desa belum bisa bekerja secara maksimal dalam mendukung upaya pengembangan Desa. Untuk itu kemudian beberapa pemuda-pemudi Desa berinisiatif untuk menggerakkan kembali Pokdarwis. Setelah dilakukan pemetaan potensi yang ada di Desa, kemudian diputuskan untuk mengembangkan Danau Pading sebagai tempat wisata. Semula potensi di Danau Pading hanya menempatkan air terjun Sadap sebagai spot wisata, kemudian membuka jalur pendakian kidding, wisata bahari gusung perlang. Secara kelembagaan Pokdarwis terdiri dari beberapa divisi yang memiliki kordinator dan tupoksi yang disepakati bersama. Penguatan kelembagaan menjadi penting dilakukan dalam memperkuat simpul-simpul gerakan dan pemberdayaan potensi yang ada di kawasan Danau Pading.

Pokdarwis Linau Mentari menjadi inisiator dalam pengembangan sektor pariwisata Desa Perlang, sehingga danau pading memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Kehadiran Pokdarwis dapat dilihat sebagai bagian dari respon masyarakat local atas peluang yang tersedia sebagai hasil dari demokratisasi dan desentralisasi. Dalam perkembangannya, Pokdarwis berhasil mengubah warga menjadi lebih peka terhadap persoalan lingkungan hidup, merevitalisasi dan mengembangkan kearifan local, serta mengembangkan sumber-sumber penghidupan melalui fasilitas pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dalam ajang Anugerah Desa Wisata (ADWI) tahun 2022, mendapatkan anugerah Juara 3 Desa Wisata Kategori Digital Kreatif ADWI 2022 (Kompas, 2022).

Tumbuhnya inisiatif warga desa, seperti Pokdarwis di Desa Perlang dalam arena demokrasi desa merupakan pertanda baik bagi

berseminya gerakan sosial pada aras lokal yang menjadi kekuatan bagi kemajuan demokrasi *substantive* (substantif) Gerakan social merupakan sebuah *intermediary space* (ruang antara) yang menjembantani kepentingan masyarakat sipil dengan negara merupakan suatu sumber bagi proses penguatan demokrasi terutama dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. (Darmawan, 2006).

Roda pergerakan Pokdarwis dari sisi pendanaan lebih mengedepankan swadaya dari pengurus atau anggota Pokdarwis yang dibangun dalam semangat untuk memberikan inovasi dan kreativitas pengembangan Danau Pading. Pokdarwis lebih leluasa dalam pengembangan Danau Pading tepatnya di tahun 2021 pada moment Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diseselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dengan berhasil masuk 300 besar. Kemudian pada tahun 2022 pada moment ADWI, Desa Wisata Perlang masuk 50 besar. Keikutsertaan dalam ADWI ini merupakan langkah berani dari Pokdarwis untuk mendaftarkan Desa Wisata Perlamhg, meskipun masih dalam pengembangan dan pembenahan potensi di kawasan Danau Pading. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan terpilihnya Desa Wisata Perlang masuk dalam Desa Wisata kategori Digital Kreatif, dengan kriteria penilaian pada bidang home stay, daya tarik wisata, souvenir, toilet, CHSE, digital ekonomi kreatif, dan UMKM.

Tampak bahwa gerakan masyarakat sipil mampu memanfaatkan peluang yang diberkan oleh UU Desa dalam rangka pelembagaan demokrasi lokal. UU Desa memberikan ruang bagi lahirnya kelompok yang bergerak memperjuangkan isu-isu publik dalam arena-arena formal dan informal di desa, dengan ruang partisipasi yang lebih luas, termasuk bagi kehadiran kelompok marginal di desa. Menguatkan institusi demokrasi berupaperangkat aturan dan kebijakan, terutama di tingkat masyarakat sipil dalam rangka pengelolaan asset lokal menuju keadilan ekonomi, sosial dan politik, berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif merupakan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide dalam merencanakan sesuatu berkaitang dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan dari atasan. Bila atasan selalu menjegal setiap inisiatif dari bawahan tanpa memberikan penghargaan berupa argumentasi yang jelas dan mendukung dapat menyebabkan organisasi kehilangan energi atau daya dorong kemajuan. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa inisiatif dibutuhkan untuk mendorong kemajuan organisasi. Organisasi dapat dimaknai sebagai kelompok sosial yang dibentuk oleh sekumpulan orang dengan tujuan tertentu (Lindawati, 2018).

Pada penelitian ini organisasi tersebut dapat diidentikan dengan Pokdarwis yaitu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh masyarakat Desa Perlang yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Danau Pading. Keberadaan Pokdarwis Desa Perlang tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sekitar obyek wisata sehingga bersifat lokal. Sifat lokal yang dimaksud adalah berkaitan dengan kearifan lokal yang sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genious*). Kearifan lokal dimaknai sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh oleh masyarakat setempat melalui akumulasi pengalaman dalam percobaan dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap alam dan budaya sekitarnya (Setyawati, 2014). Kearifan lokal dibuat berfungsi dinamis dan terhubung dengan situasi global. Definisi tersebut menyiratkan beberapa konsep yaitu 1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; 2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan 3) kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya.

Langkah Taktis Pokdarwis

Pokdarwis melakukan promosi Desa Wisata Perlang kepada masyarakat sekitar Desa dengan pendekatan sosial budaya berupa perayaan tradisi Nganggung dengan jumlah dulang sebanyak 700 buah. Nganggung merupakan Tradisi yang memiliki nilai kegotong royongan dan kebersamaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan adat ini tercermin dari keikutsertaan setiap keluarga yang berada dalam suatu kawasan pemukiman yang mempunyai hajatan menyelenggarakan adat nganggung. Setiap keluarga membawa satu dulang makanan yang ditutup dengan tudung saji ke tempat berlangsungnya acara, biasanya di mesjid atau di balai desa. Karena tradisi ini masih selalu dilakukan maka pada umumnya

setiap keluarga Melayu merniliki dulang kuningan sebagai tempat untuk membawa makanan dan tudung saji untuk menutup makanan yang dibawa. Dalam tradisi nganggung, setiap pintu rumah (keluarga) membawa satu dulang makanan. Karena itu tradisi nganggung juga disebut adat Sepintu Sedulang. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialiasi kepada warga lokal bahwa ada upaya untuk pengembangan Desa Wisata Perlang, secara khusus kawasan Danau Pading.

Namun Pokdarwis tidak lepas dari tantangan dalam pengembangan Desa Wisata Perlang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Pokdarwis seperti oknum masyarakat yang membuka usaha, tapi tidak mau mengikuti aturan dari Pokdarwis. Fenomena pengembangan Desa Wisata Perlang seperti limbah atau sampah yang dihasilkan dari tempat usaha masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini kemudian dibentuk Pujasera sebagai *food center* agar lebih terkontrol penataan usaha masyarakat di sekitar wilayah Danau Pading. Gerak Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata Perlang belum memiliki kemitraan, kecuali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Tengah. Penguatan kelembagaan dan kapasitas personal Pokdarwis dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan pariwisata, dan pendampingan khusus dari Dinas Pariwisata. Pokdarwis bersinergi dengan kelompok PPK Desa Perlang dalam bentuk usaha cathering makanan, souvenir, tapi belum sebagai mitra dari Pokdarwis.

Perspektif *demokrasi deliberative*, keberadaan asosiasi semacam forum atau kelompok warga tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan *civil society*. Habermas (1998) menyatakan warga hanya dapat mengkapitalisasi social power (kekuatan social dan mengubahnya menjadi political power (kekuatan politik) jika mereka mereka mampu menyampaikan kepentingan-kepentingannya dalam bahasa yang dapat menghadirkan alasan-alasan yang menyakinkan dan menyebarkan orientasi nilai yang mereka miliki. Teori demokrasi deliberatif mengutamakan adanya diskurusus antara warga dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Demokrasi deliberatif sebagai model relasi warga dan Negara, dimana terdapat peran politik aktif warga Negara yang membangun opini mereka secara publik dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung, dengan menggunakan bahasa, media dan cara yang dapat diterima bersama, sehingga dapat terbangun komunikasi politik yang cair antara warga dan Negara hukum demokratis.

Demokrasi deliberatif bukan berarti jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentatif. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas (Hardiman, 2007).

Arah Strategis Pokdarwis Linau Mentari

Pokdarwis memiliki tujuan dalam pengembangan ekonomi wisata melalui usaha souvenir, peningkatan kualitas bahasa inggris dari aktor Pokdarwis, karena tidak cukup mengandalkan bahasa lokal dalam pengenalan Desa Wisata Perlang. Untuk itu Pokdarwis memiliki harapan agar ada pendampingan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu Pokdarwis juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam hal ini melalui BUMDes sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan Desa Wisata Perlang. Sinergi kelembagaan menjadi penting dalam upaya pencapaian tujuan bersama mengenai pengembangan potensi lokal bagi kesejahteraan masayarakat Desa Perlang.

Partisipasi sebagai tindakan untuk turut serta yaitu kegiatan atau penyataan untuk mengambil bagian dari beragam kegiatan dengan tujuan memperoleh manfaat (Theresia, 2014). Sedangkan untuk bentuk partispasi masyarakat yaitu; (1) partisipasi buah pikiran, (2) partisipasi tenaga, yang diberikan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, (3) partisipasi harta benda, (4) partisipasi sosial (Septiyasa, 2013). Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk pembangunan dalam pengembangan pariwisata, selalu mengikuti proses pembangunan itu sendiri. Salman (2005) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimulai dari perencanaan,implementasi, pemanfaatan hasil hingga evaluasi pembangunan.

Pada tahap perencanaan, mengajak masyarakat untuk mendefenisikan apa kebutuhan dan masalah mereka, mendiskusikan

bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan tersebut, memikirkan bagaimana proses penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan serta merundingkan bagaimana keberhasilan penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini akan melahirkan *sense of indentification* (kemampuan identifikasi). Partisipasi masyarakat pada tahap implementasi, melibatkan masyarakat ke dalam proses pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Masyarakat ikut menyumbang tenaga, pikiran dan materi selama kegiatan pembangunan dijalankan. Masyarakat dilibatkan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan berbasis pada kesukarelaan, bukan mobilisasi atau paksaaan. Disamping itu masyarakat juga berpartisipasi untuk mengawasi sejauhmana pelaksanaan pembangunan berlangsung, khususnya dalam konsistensi implementasi tersebut dengan rencana yang telah dirumuskan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini akan melahirkan *sense of integrity* (kepekaan integrasi) yaitu rasa kesatuan, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan rasa kegotongroyongan.

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil adalah kemampuan masyarakat menikmati secara adil dan merata hasil pembangunan baik yang dapat diukur secara fisik seperti peningkatan infrastruktur maupun sifatnya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil harus mampu menyentuh semua lapisan, karena bila yang menikmati pembangunan hanya lapisan atau golongan tertentu, maka akan menimbulkan kecemburuan pada masyarakat lainnya. Partisipasi pada tahap ini akan melahirkan *sense of belonging* (rasa memiliki) akan hasil-hasil pembangunan. Sementara partisipasi pada tahap evaluasi adalah mengikutsertakan masyarakat dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Evaluasi masyarakat akan menjadi bahan pelajaran untuk selanjutnya. Partisipasi pada tahap ini akan melahirkan *sense of responsibility* (rasa bertanggungjawab) yaitu rasa ikut bertanggungjawab terhadap hasil pembangunan.

SIMPULAN

Demokrasi deliberatif memiliki potensi besar dalam mengelola transisi pasca tambang menuju desa wisata. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi terbuka dan inklusif, keputusan yang dihasilkan dapat lebih terinformasi, inklusif, dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Proses ini juga dapat memberikan dampak positif pada partisipan serta masyarakat luas dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan demokrasi deliberatif dalam inisiasi pasca tambang menuju desa wisata dapat menjadi model yang efektif dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Transformasi lahan pasca tambang menjadi desa wisata adalah langkah yang tepat dalam upaya memanfaatkan lahan yang terdegradasi secara produktif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan, dan mempromosikan potensi lokal, desa wisata pasca tambang dapat menjadi contoh sukses dari pendekatan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2021, *Kecamatan Lubuk Besar Dalam Angka 2021*

Darmawan, T. 2006. *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta. Pustaka LP3ES

Disnaker Provinsi Bangka Belitung, 2023, Potensi Daerah, diakses melalui website, https://disnaker.babelprov.go.id/content/potensi-daerah, diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 14:51

Elissa, L. 2022, Deliberasi dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru pada Masa Covid-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 5(1)

Diyah, Pujiati dan Widanar, Erman. 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*, 12(1), 71-86

F. Budi, Hardiman, 2007, *Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Habermas, J. 2010. *Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Bantul: Kreasi Wacana

Habermas, J. 1998. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, Cambridge.

Kompas, 2022, Daftar Pemenang ADWI 2022 Tersebar di Seluruh Indonesia, diakses

melalui https://travel.kompas.com/read/2022/10/31/101012227/daftar-pemenang-adwi-2022-tersebar-di-seluruh-indonesia

Lindawati, Y.I. 2018, Dinamika Pengembangan Pariwisata Pantai Goa Cemara di dusun Patihan kabupaten Bantul. *Jurnal Hermeneutika*, 4(1)

Musthofa, B.M. 2019, Urgensi Penguatan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Perdesaan. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1)

Mongabay, 2022, selain rusak lingkungan tambang timah di bangka juga makan korban jiwa, diakses melalui https://www.mongabay.co.id/2020/09/17/selain-rusak-lingkungan-tambang-timah-di-bangka-juga-makan-korban-jiwa/, diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 15.00

Musthofa, Budiman Mahmud, 2019, Strategi Mengembangkan Inisiatif dan Partisipasimasyarakat Lokal untuk Mengembangkan Wisata Perdesaan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Vokasi Indonesia*, 7(2)

Nita Sari dkk. 2019, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2)

Piliang, Yasraf A, et. all. 2005. *Republik Tanpa Ruang Publik.* Yogyakarta : IRE Press.

Salman. 2005. *Pembangunan Parsipatoris*. Program Studi Pembangunan. Makassar. Universitas Hasanuddin

Septiyasa, N. 2013. Masyarakat berdesa: realita atau utopia? Penelitian evaluasi tentang partisipasi masyarakat desa Pasca implementasi undang-undang desa. *Laporan Penelitian Perorangan*. Yogyakarta: APMD

Setyawati, E.Y. 2014. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal. *Laporan Penelitian Perorangan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sujito, Arie. 2016. Desa dan Tantangan Demokrasi Lokal, *Makalah*, Yogyakarta

Sitorus, S, 1998, *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, Tarsito : Bandung

Sutedjo, Sujitno, 2007, *Sejarah Penambangan Timah Di Indonesia*, Jakarta.

Theresia, Aprillia, et. al. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta

Yin, K.R, 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.